



**Proceeding**



**MENYOROT  
RUU KUHP DAN KUHP  
MEWUJUDKAN INDONESIA BERSIH DAN JUJUR**

**Disampaikan Dalam Acara Diskusi Panel  
Batam, 29 Januari 2014**

**Diterbitkan oleh :  
Forum Pimpinan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia dan  
Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan**

*Sekapur Sirih Dari*

**FORUM PIMPINAN PENDIDIKAN TINGGI ILMU HUKUM  
(FPPTIH)**

Awal kwartal keempat tahun 2013, pembahasan RUU KUHP dan KUHAP di DPR RI menuai tanggapan hangat dari masyarakat. Pasalnya, karena dari kedua konsep RUU tersebut diduga ada upaya menyentuh peran dan kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang cenderung untuk dilemahkan. Misalnya saja, terkait kedudukan tindak pidana korupsi yang tadinya berstatus sebagai tindak pidana khusus, kemudian diwacanakan diatur dalam KUHP. Kemudian, kewenangan KPK dalam melakukan tindakan hukum penyelidikan dan penyidikan berupa penyadapan, terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Pengadilan.

Pola-pola konsep pembuatan undang-undang yang di rancang melalui RUU KUHP dan KUHAP memperoleh penentangan dari kalangan akademisi maupun komunitas masyarakat intelektual yang ikut merasa bertanggungjawab atas pemberantasan tindak pidana korupsi maupun penegakan hukum yang berorientasikan kepada keadilan sebagai tujuan hukum.

Tak terkecuali pula, komunitas Forum Pimpinan Pendidikan Tinggi Ilmu Hukum (FPPTIH) yang membahas RUU KUHP dan KUHAP melalui seminar kecil di Batam 29 Januari 2014. Selanjutnya beberapa konsep pemikiran dari pembicara dibukukan dalam bentuk proceeding yang diterbitkan atas prakarsa FPPTIH bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA) serta Cintya Press Jakarta.

Dengan diterbitkannya proceeding ini, diharapkan bermanfaat buat masyarakat serta dapat menjadi sumbangsih bahan pertimbangan bagi yang berkepentingan pembahasan lebih lanjut RUU KUHP dan KUHAP.

Jakarta, 11 Maret 2014

Salam,  
ttd,

**Surajiman, SH., MH**  
Ketua FPPTIH

*Sebelum Sirih Dari*

**FORUM PIMPINAN PENDIDIKAN TINGGI ILMU HUKUM  
(FPPTIH)**

Awal kwartal keempat tahun 2013, pembahasan RUU KUHP dan KUHAP di DPR RI menuai tanggapan hangat dari masyarakat. Pasalnya, karena dari kedua konsep RUU tersebut diduga ada upaya menyentuh peran dan kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang cenderung untuk dilemahkan. Misalnya saja, terkait kedudukan tindak pidana korupsi yang tadinya berstatus sebagai tindak pidana khusus, kemudian diwacanakan diatur dalam KUHP. Kemudian, kewenangan KPK dalam melakukan tindakan hukum penyelidikan dan penyidikan berupa penyadapan, terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Pengadilan.

Pola-pola konsep pembuatan undang-undang yang di rancang melalui RUU KUHP dan KUHAP memperoleh penentangan dari kalangan akademisi maupun komunitas masyarakat intelektual yang ikut merasa bertanggungjawab atas pemberantasan tindak pidana korupsi maupun penegakan hukum yang berorientasikan kepada keadilan sebagai tujuan hukum.

Tak terkecuali pula, komunitas Forum Pimpinan Pendidikan Tinggi Ilmu Hukum (FPPTIH) yang membahas RUU KUHP dan KUHAP melalui seminar kecil di Batam 29 Januari 2014. Selanjutnya beberapa konsep pemikiran dari pembicara dibukukan dalam bentuk proceeding yang diterbitkan atas prakarsa FPPTIH bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA) serta Cintya Press Jakarta.

Dengan diterbitkannya proceeding ini, diharapkan bermanfaat buat masyarakat serta dapat menjadi sumbangsih bahan pertimbangan bagi yang berkepentingan pembahasan lebih lanjut RUU KUHP dan KUHAP.

Jakarta, 11 Maret 2014

Salam,  
ttd,

**Surajiman, SH., MH**  
Ketua FPPTIH



## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vi</b>
 Refleksi Basis Politis, Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis Di Balik Misi Rekodifikasi Yang Terkandung Dalam RUU KUHP dan Analisis Beberapa Masalah Aktual <b>Oleh : Prof. Dr. Muladi, S.H .....</b>	<b>1 - 23</b>
 Menegakkan Hukum Dengan Format RUU KUHP Baru Untuk Menjadikan Indonesia Bersih dan Jujur <b>Oleh: Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH. MM .....</b>	<b>24 - 37</b>
 Pembaharuan Hukum Pidana Melalui RUU KUHP dan RUU KUHP Dalam Mewujudkan Indonesia Bersih dan Jujur <b>Oleh: Taslim Chaniago .....</b>	<b>38 - 59</b>
 Beberapa Catatan Terhadap Rancangan Undang-Undang R.I. Tentang Hukum Acara Pidana (RUU-KUHP) Dalam Rang- ka Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Yang Jujur, Trans- paran Dan Akuntabel <b>Oleh: D. Andhi Nirwanto .....</b>	<b>60 - 69</b>
 Perlunya Sinkronisasi RUU KUHP dan RUU KUHP Dalam Proses Acara Pidana <b>Oleh: Irjen Pol. Drs. Anton Setiadji, SM., M.H .....</b>	<b>70 - 86</b>
 KPK Tetap Menjadi Lembaga Pemberantasan Korupsi Yang Akuntabel <b>Oleh : Gunawan Nachrawi, SH, MH .....</b>	<b>87 - 95</b>
 Mereduksi Semangat Pemberantasan Korupsi Pada Pembah- asan RUU KUHP dan RUU KUHP <b>Oleh: Surajiman, SH, MH .....</b>	<b>96 - 101</b>
 Catatan Seputar RUU KUHP & RUU KUHP <b>Oleh : Chatarina Muliana .....</b>	<b>102 - 110</b>

## **MENEGAKKAN HUKUM DENGAN FORMAT RUU KUHAP BARU UNTUK MENJADIKAN INDONESIA BERSIH DAN JUJUR**

**Oleh: Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH. MM<sup>1</sup>**

### **A. Pendahuluan**

Pembangunan Nasional yang sedang berlangsung dan perlunya suatu kesinambungan yang terus menerus dan harus tetap dipertahankan. Hal ini adalah untuk mewujudkan cita-cita bangsa, oleh karena itu diperlukan sumber daya manusia yang berkemampuan dan berkulitas serta mempunyai aturan hukum yang jelas untuk menyelenggarakan pembangunan tersebut.

KUHAP Kitab Undang Hukum Acara Pidana salah satu contohnya. Kita ketahui bahwa dengan dipergunakan KUHAP yang ada sekarang ini dan selama ini dipergunakan merupakan produk yang sudah terlalu lama (1981) sehingga perlu adanya perbaikan dan penyesuaian dengan perilaku masyarakat sekarang ini dan globalisasi yang sedang berlangsung serta perkembangan hukum sekarang yang dalam beracaranya mempergunakan KUHAP, tentu dalam penggunaannya sudah banyak yang tidak relevan dengan kekinian dari peradaban kehidupan masyarakat Indonesia.

RUU KUHAP yang saat ini terus digodok diharapkan akan menjadi KUHAP yang ideal bagi masyarakat Indonesia demi cita-cita nasional untuk mencapai kesejahteraan adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta menciptakan masyarakat madani. Untuk menjadikan masyarakat madani tersebut kita harus melihat dua kalimat yang ada dalam UUD 1945.

Dua kalimat penting yang perlu dicermati dalam Undang-Undang Dasar 1945, adalah "Indonesia ialah negara yang berdasarkan

---

<sup>1</sup> Dekan Fakultas Hukum dan Guru Besar Ilmu Hukum, Universitas Borobudur Jakarta.